

Pria India Panggul Mayat Istrinya, Berjalan Kaki 2 Km ke Pemakaman

NEW DELHI (IM) - Rekaman video menunjukkan seorang pria memanggul jasad istrinya bernama Nagalakshmi di pundaknya untuk menuju tempat pemakaman di India.

Nagalakshmi meninggal dunia karena Covid-19. Dia seorang pengemis yang meninggal di luar stasiun kereta di distrik Kamareddy, negara bagian Telangana, India.

Namun penduduk setempat takut tertular virus tersebut sehingga menolak membantu suaminya, Swami. Swami berhenti di tempat istrinya biasa mengemis. Petugas polisi di stasiun itu menyumbang untuk penguburannya lalu Swami membawa sendiri istrinya ke tempat pemakaman.

Itu terjadi ketika jumlah kematian akibat Covid di India melonjak melewati 200.000 orang di tengah kri-

sis kekurangan tempat tidur rumah sakit dan oksigen.

Selama 24 jam terakhir, India mencatat rekor dunia 360.960 infeksi baru, sehingga total kasus di negara itu mencapai 18 juta.

Dengan fasilitas kesehatan yang kewalahan, sejumlah negara termasuk Inggris segera mengirim peralatan.

Sementara itu, rakyat India berjuang mendaftar secara online untuk program vaksinasi massal.

Pendaftaran untuk semua orang yang berusia di atas 18 dimulai pekan ini, tetapi tidak ada stok vaksin yang cukup untuk 600 juta orang yang memenuhi syarat.

Tsunami Covid di India tampaknya akan terus berlanjut dalam beberapa waktu mendatang karena tren yang ada menunjukkan peningkatan kasus positif dan kematian. **gul**



LIBURAN HARI BURUH DI WUHAN - TIONGKOK

Penggemar menghadiri pertunjukan band rock di Festival Musik Strawberry selama liburan Hari Buruh di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, Sabtu (1/5).

Dunia Terancam Kekurangan Perawat dalam Beberapa Tahun ke Depan

Tenaga perawat global yang kini berjumlah sekitar 27 juta orang kemungkinan besar akan berkurang separuhnya dalam beberapa tahun.

JAKARTA (IM) - Dewan Perawat Internasional memperingatkan bahwa dunia sedang menghadapi krisis perawat dan diperkirakan akan terjadi kekurangan perawat yang signifikan dalam beberapa tahun mendatang.

Tenaga perawat global yang kini berjumlah sekitar 27 juta orang kemungkinan besar akan berkurang separuhnya dalam beberapa tahun mendatang.

Dewan Perawat Internasional (ICN) menyatakan

survei terbarunya terhadap 64 asosiasi perawat nasional mendapati sengketa mengenai gaji, kondisi kerja, kekerasan, dan intimidasi menjadi penyebab perawat meninggalkan profesinya.

Selain itu, ada pula apa yang disebut efek Covid-19. Laporan ini mendapati kurangnya proteksi diri serta jam kerja yang panjang dan membuat stres telah berdampak besar terhadap kesehatan jiwa perawat di seluruh dunia.

CEO ICN Howard Catton mengatakan para politisi dan pemimpin negara telah mengakui betapa bernilainya perawat dalam hal kepedulian dan perhatian yang mereka berikan. Namun, lanjutnya, mereka belum mengakui nilai para perawat bagi masyarakat dan belum memberi kompensasi yang sesuai.

"Dan, saya pikir ini juga menjadi sebagian besar sumber ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, sebagian dari aksi yang kita lihat dari perawat di seluruh dunia. Inilah jurang antara retorika tersebut, retorika positif bagi perawat tetapi kurang tindakan dan tanggapan praktis untuk mendukung perawat," jelasnya.

Aksi mogok terkait gaji perawat maupun kondisi kerja

mereka telah terjadi di Zimbabwe, Lebanon, Irlandia Utara, Amerika Serikat dan tempat-tempat lain. Laporan itu menyebutkan bahwa perselisihan, ketidakpuasan yang kian besar dan keprihatinan terkait perlindungan di tempat kerja telah mengurangi minat orang untuk menekuni karier dalam bidang keperawatan.

Masalah lainnya yang dihadapi profesi ini, ujar Catton, adalah terganggunya pendidikan keperawatan oleh pandemi. Ia mengatakan, akibatnya adalah tertundanya kelulusan perawat baru antara enam hingga 12 bulan.

Jadi, penundaan yang muncul, meningkatnya ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, keduanya, menurut kami, kembali berpotensi menimbulkan

dampak negatif baik pada rekrutmen untuk profesi perawat maupun retensi perawat yang kita miliki," jelasnya.

"Masalah-masalah dan keprihatinan ini ada di berbagai penjuru dunia, tetapi semakin terasa di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Ini menyebabkan semakin berkurangnya tenaga perawat terdidik. Laporan ICN mencatat eksodus atau kepindahan besar-besaran perawat dari negara-negara berkembang ke negara-negara lebih kaya, di mana gaji dan kondisi kerja lebih baik.

Pada saat bersamaan, laporan ICN menyatakan sebagian di antara negara kaya itu aktif berupaya merekrut perawat di negara-negara lebih miskin untuk mengurangi kekurangan tenaga perawat yang mereka alami. **tom**

Undang-undang di 20 Negara Membebaskan Pelaku Pemerkosaan Menikah dengan Korbannya

MAROKO (IM) - Amina Filali bunuh diri pada usia 16 tahun, setelah dipaksa menikah dengan pemerkosannya. Kakaknya, Hamida ikut serta dalam protes di Maroko yang akhirnya berujung pada dicabutnya Undang-Undang yang mengizinkan pelaku menikah dengan korban lepas dari jeratan hukum. Ketika Amina Filali berusia 15 tahun, ia memberi tahu kedua orang tuanya bahwa ia diperkosa oleh seorang pria berusia 25 tahun. Keluarga itu, "atas anjuran pejabat hukum," terpaksa menikahkan Amina dengan pemerkosanya.

Beberapa bulan kemudian setelah melaporkan pemerkosaan dan penyerangan, remaja itu bunuh diri pada usia 16 tahun dengan menenggak racun tikus. Amina yang tinggal di kota kecil di Maroko meninggal pada 2012. Kasusnya memicu protes dan upaya oleh kelompok perempuan di negara itu.

Parlemen Maroko akhirnya mencabut UU yang memungkinkan pelaku pemerkosaan terhindar dari jeratan hukum bila ia menikahi korbannya. Menurut laporan tahunan PBB terkait penduduk dunia, 20 negara mengizinkan pelaku pemerkosaan menikahi korbannya agar terhindar dari tuntutan hukum.

Dr Natalia Kanem, Direktur Eksekutif UN Population Fund (UNFPA) yang menerbitkan laporan itu pada pertengahan April lalu, mengatakan undang-undang seperti itu "sangat salah" dan "merupakan cara mengendalikan perempuan." "Penolakan hak tak boleh terlindung di dalam hukum. Undang-undang 'Menikah dengan pemerkosamu' mengeser beban bersalah kepada korban dan seolah membersihkan satu tindakan kejahatan," katanya.

Para aktivis dari LSM Ahaad di Lebanon memprotes UU yang memungkinkan pemerkosa terbebas dari jeratan hukum bila ia menikahi korban. Peraturan itu dicabut pada 2017. Dima Dabbous, Direktur Equality Now untuk Timur Tengah dan Afrika yang kajiannya diungkap dalam laporan UNFPA, menyatakan undang-undang itu menggambarkan budaya "yang beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya dan bahwa mereka adalah properti keluarga. Ini pendekatan kesukuan yang kuno terkait seksualitas dan martabat yang disalah artikan."

Dabbous menambahkan, bahwa "sangat sulit mengubah [undang-undang ini], tetapi bukan suatu yang tidak mungkin." Ia mengatakan undang-undang di Maroko dicabut menyusul kemarahan banyak orang setelah seorang remaja bunuh diri karena dipaksa menikah dengan pemerkosanya. Yordania, Palestina, Lebanon dan Tunisia mengikuti langkah itu. Tetapi, Kuwait masih mengizinkan

pelaku untuk menikahi korbannya dengan izin wali.

Di Rusia, bila pelaku telah berusia 18 tahun dan melakukan perkosaan terhadap perempuan berusia 16 tahun, pelaku bebas dari hukum bila ia menikahnya. Di Thailand, perkawinan dianggap sebagai penyelesaian untuk kasus perkosaan bila pelaku berusia di atas 18 tahun dan korban berusia di atas 15 tahun, bila korban "setuju" dan bila pengadilan memberikan izin pernikahan itu.

Undang-undang dan praktik yang tidak mengindahkan hak perempuan banyak terjadi dan sulit diberantas, kata UNFPA. Badan PBB ini melaporkan ada 43 negara yang tidak memiliki hukum mengkriminalkan perkosaan bagi pasangan yang telah menikah. Kasus bunuh diri Amina di Maroko memicu protes besar dan berujung pada dicabutnya UU yang memungkinkan pelaku menikahi korban.

Praktik ini harus dihentikan

Laporan yang memusatkan pada otonomi tubuh - kemampuan untuk membuat pilihan terkait kesehatan, kontrasepsi dan hak untuk menolak berhubungan seks dengan pasangan mereka. "Fakta bahwa hampir setengah perempuan tidak dapat membuat keputusan sendiri apakah mereka bisa menolak pasangannya untuk berhubungan seks, penggunaan kontrasepsi atau mencari fasilitas kesehatan."

Di Mali, Niger dan Senegal, situasinya lebih memprihatinkan. Kurang dari satu dari 10 perempuan yang bisa membuat keputusan terkait kesehatan, kontrasepsi dan hak untuk menolak berhubungan seks dengan pasangan mereka. "Fakta bahwa hampir setengah perempuan tidak dapat membuat keputusan sendiri apakah mereka bisa menolak pasangannya untuk berhubungan seks, penggunaan kontrasepsi atau mencari fasilitas kesehatan untuk dirinya sendiri, harus membuat kita semua marah," kata Kanem.

"Pada dasarnya, ratusan juta perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Hidup mereka diatur oleh orang lain," tambahnya.

Lebih dari 30 negara membatasi kebebasan perempuan untuk tidak keluar rumah, sementara bagi mereka yang cacat, peluang mereka menjadi sasaran serangan seksual, hampir tiga kali lipat lebih tinggi. Pendidikan merupakan kunci dalam mengatasi masalah ini, menurut laporan PBB tersebut. Tetapi undang-undang harus diganti dan kesetaraan hak perlu ditingkatkan. "Tak adanya hak atas tubuh merupakan pelanggaran hak dasar perempuan yang memperkuat ketidakadilan dan mengabdikan kekerasan akibat diskriminasi gender," kata Kanem.

"Praktik ini mengancamurkan semangat (hidup) dan harus dihentikan," tutupnya. **gul**

AS Resmi Larang Perjalanan dari India Masuk Negaranya

WASHINGTON (IM) - Amerika Serikat (AS) menerapkan larangan baru perjalanan dari India mulai hari Selasa (4/5), karena gelombang penularan Covid-19 yang menghancurkan seluruh negara Asia.

Pemerintahan Presiden Joe Biden membuat keputusan itu atas saran dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), menurut juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.

"Kebijakan itu akan diterapkan mengingat penularan Covid-19 yang sangat tinggi dan berbagai varian virus baru

yang beredar di India," kata Psaki hari Sabtu (1/5).

Pembatasan itu akan melarang sebagian besar warga non-AS memasuki Amerika, menurut kantor berita Reuters.

AS telah menerapkan larangan perjalanan serupa untuk sebagian besar warga non-AS yang berada di hotspot virus corona lain dalam 14 hari terakhir, termasuk Afrika Selatan, Brazil, Inggris, Irlandia, Uni Eropa, Tiongkok, dan Iran.

Warga AS di India diijinkan untuk terbang pulang, tetapi seperti semua pelancong internasi-

onal yang terbang ke AS, mereka diwajibkan untuk menunjukkan bukti tes negatif virus korona atau bukti sembuh dari Covid-19.

CDC juga menyarankan agar semua pelancong internasional mendapat tes Covid-19, tiga hingga lima hari setelah tiba di AS dan mengkarantina diri di rumah setidaknya selama tujuh hari, meskipun jika hasil tes mereka negatif.

Negara lain, termasuk Inggris, Jerman dan Singapura, juga telah menerapkan pembatasan perjalanan serupa kepada India. **ans**

Aksi Demonstrasi Myanmar Serukan Revolusi

YANGON (IM) - Ribuan penunjuk rasa kembali beraksi di sejumlah kota di Myanmar pada Minggu (2/5). Demonstrasi kali ini menggandeng komunitas ekspatriat di seluruh dunia untuk menandai revolusi musim semi global Myanmar.

"Guncang dunia dengan suara persatuan rakyat Myanmar," kata penyelenggara demonstrasi dalam sebuah pernyataan.

Sejauh ini tidak ada laporan terjadi kekerasan dalam aksi demonstrasi tersebut. Demonstrasi untuk menentang pemerintahan militer telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan, sejak kudeta yang dilakukan pada 1 Februari.

Pasukan keamanan menggunakan kekuatan maksimal untuk menghadapi demonstran. Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan pasukan keamanan

telah menewaskan sedikitnya 759 penunjuk rasa sejak kudeta.

Di beberapa tempat, warga sipil dengan senjata darurat telah bertempur dengan pasukan keamanan. Sementara di daerah pusat fasilitas militer dan pemerintah yang telah diamankan selama beberapa generasi, telah diguncang oleh serangan roket dan gelombang ledakan kecil.

Penyiar yang dikelola pemerintah dalam buletin berita utama pada Sabtu (1/5) malam memberikan rincian setidaknya terjadi 11 ledakan selama 36 jam sebelumnya. Ledakan sebagian besar terjadi di kota utama Yangon. Ledakan tersebut menyebabkan beberapa kerusakan tetapi tidak ada korban jiwa maupun luka.

"Beberapa perusuh yang tidak menginginkan stabilitas negara telah melemparkan dan menanam bom buatan tangan di gedung-

gedung pemerintah dan di jalan umum," kata penyiar negara itu.

Media Khit Thit melaporkan, ledakan terjadi di luar barak polisi di Yangon pada Ahad pagi. Ledakan itu menyebabkan kendaraan terbakar, tetapi sejauh ini belum ada informasi mengenai korban.

Kemudian, sebuah ledakan dilaporkan terjadi lain di kota itu. Sebuah portal berita di Negara Bagian Shan di timur laut melaporkan ledakan terjadi di luar rumah seorang pengusaha terkemuka. Program Pembangunan PBB mengatakan aksi protes dan pembangkangan sipil telah melumpuhkan ekonomi dan meningkatkan bencana kelaparan bagi warga miskin. Program Pembangunan PBB memperingatkan bahwa dampak pandemi dan krisis politik dapat menyebabkan 25 juta warga Myanmar jatuh ke dalam jurang kemiskinan pada 2022. **tom**



PERINGATAN MAY DAY DI TURKI

Polisi anti kerusuhan berkelahi dengan pengunjuk rasa saat mereka mencoba menentang larangan dan berjalan di Taksim Square untuk memperingati May Day, selama pemberlakuan "penutupan penuh" secara nasional untuk memperlambat tingkat penularan virus corona (COVID-19), di Istanbul, Turki, Sabtu (1/5).

India Disarankan Lockdown Beberapa Pekan untuk Redam Tsunami Covid-19

WASHINGTON (IM) - Penasihat medis Gedung Putih, Anthony Fauci menyarankan India untuk melakukan penguncian selama beberapa pekan untuk meredam lonjakan kasus Covid-19. India sejauh ini belum mereapkan penguncian, meski kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Pemerintah Perdana Menteri India, Narendra Modi telah menolak memperlakukan penguncian nasional setelah adanya ledakan kasus. Alasannya, penguncian ketat, yang diberlakukan India pada tahun lalu menyebabkan penderitaan manusia yang meluas dan pukulan ekonomi yang menyakitkan.

"Saya pikir hal terpenting dalam waktu dekat adalah mendapatkan oksigen, mendapatkan persediaan, mendapatkan obat, mendapatkan APD, hal-hal semacam itu," kata Fauci

dalam sebuah pernyataan.

"Tapi juga, salah satu hal yang harus segera dilakukan adalah menyerukan penguncian negara," sambungnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Minggu (2/5).

Dia menuturkannya, India tidak perlu untuk melakukan penguncian jangka panjang. Menurutnya, India bisa memperlakukan penguncian selama beberapa pekan, yang menurutnya cukup untuk meredam penyebaran Covid-19.

"Jika Anda melakukan penguncian, Anda tidak perlu melakukannya selama enam bulan. Anda bisa melakukan penguncian sementara untuk mengakhiri siklus transmisi," ujarnya.

"Tidak ada yang suka mengunci negara. Tapi jika Anda melakukannya hanya untuk beberapa minggu, Anda bisa memiliki dampak signifikan pada dinamika wabah," tukasnya. **gul**



PERTUNJUKAN ANJING DI MOSKOW

Anjing terrier Yorkshire tampil dalam pameran dan pertunjukkan anjing "Eurasia 2021" di Moskow, Rusia, Sabtu (1/5).